

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi diartikan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang prinsipal yang memberikan wewenang kepada orang lain atau agen untuk mengambil kebijakan dalam menjalankan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Prinsipal memberikan tugas tertentu kepada agen lalu agen menyetujui untuk melakukan tugas yang diberikan dengan memberikan beberapa masukan dan pertimbangan kepada prinsipal. Dalam sebuah perusahaan, manajemen bertugas sebagai agen dan *shareholder* mempunyai *person* sebagai prinsipal (Enggar Adityamurti, 2017). Pemilik saham disebut sebagai peninjau informasi dan pengambilan kebijakan diambil oleh agen-agensya. Peninjau informasi atau pemilik saham mempunyai tanggung jawab untuk memilih sistem informasi yang mana mereka harus mempunyai pilihan yang banyak sehingga para pengambil kebijakan atau agen dapat membuat kebijakan atau keputusan yang terbaik untuk kepentingan pemilik.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Diba (2020) menjabarkan bahwa masalah yang muncul dalam keagenan terbentuk dalam 2 (dua) hubungan sebagai berikut:

- 1) Antara manajer dan pemilik saham.

Hubungan ini terjadi ketika manajer dalam menjalankan tugasnya melakukan penyelewengan sehingga tidak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Dalam hal ini manajer mementingkan kepentingannya sendiri seperti menetapkan gaji yang besar bagi dirinya atau dengan menambah fasilitas eksekutif dikarenakan sebagian diantaranya akan menjadi beban pemegang saham lainnya

2) Antara kreditur dan pemegang saham

Dalam hal ini pemegang saham bisa mengambil keuntungan atas pemegang hutang melalui manajernya. Konflik ini terjadi karena pemilik saham dengan pemegang hutang memiliki struktur penerimaan yang berbeda. Pemegang hutang mendapatkan pendapatan yang tetap berupa pengembalian pinjaman sekaligus bunganya. Di satu sisi, pemegang saham memperoleh pendapatan di atas kelebihan atas kewajiban yang perlu dibayarkan ke pemegang hutang. Oleh karena itu, salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi konflik kepentingan ini adalah dengan tata kelola yang baik yaitu menggunakan informasi yang transparan (Pradnyana dan Noviani, 2017). Selain itu, informasi perusahaan yang transparan juga dapat memberikan nilai yang baik bagi perusahaan.

2.1.2. Teori Signal (*Signaling Theory*)

Signaling theory menjelaskan tentang bagaimana perusahaan memberikan informasi mengenai kegiatan dan laporan keuangan perusahaan kepada pihak luar atau bagi pengguna informasi. Informasi merupakan suatu hal yang penting bagi investor dan pelaku bisnis, karena informasi memberikan keterangan berupa catatan dan gambaran yang positif untuk keadaan di masa lalu, saat ini, dan keadaan di masa yang akan datang untuk kelangsungan hidup suatu perusahaan (Prasiwi, 2015). Suatu perusahaan harus menginformasikan kegiatan serta laporan keuangan dengan baik sehingga dapat menghindari asimetri informasi. Oleh karena itu apabila suatu perusahaan mempunyai sumberdaya yang berharga maka mereka akan membiarkan *stakeholders* tahu melalui informasi yang diberikan.

Menurut Melyana dan Syafruddin (2015) dengan banyaknya informasi yang diberikan diharapkan investor dan pemangku kepentingan lain dapat menerima signal baik yang diberikan perusahaan sehingga tercipta nilai bagi para *stakeholders*. Semakin banyak informasi yang diungkapkan dapat diasumsikan investor lebih banyak mengetahui penjelasan kondisi perusahaan dan semakin banyak bahan pertimbangan untuk analisis prospek perusahaan ke depan sehingga merubah keputusan investor untuk investasi.

2.1.3. Teori Trade-Off (Trade-off Theory)

Menurut teori *trade-off*, terdapat suatu tingkat *leverage* yang optimal antara struktur modal dengan nilai perusahaan. Berdasarkan teori ini, untuk mencapai struktur modal yang optimal maka perusahaan harus menyeimbangkan biaya agensi dari *financial distress* dan keuntungan pajak dari pembiayaan hutang. Struktur modal yang optimal dapat direalisasikan apabila nilai sekarang dari *tax shield* hutang adalah bernilai sama dengan nilai sekarang dari biaya kesulitan keuangan hutang. Teori ini pada umumnya menegaskan apabila perusahaan ingin meningkatkan nilai perusahaan maka pembiayaan untuk investasi harus berasal dari hutang. Pembiayaan investasi dari hutang akan berdampak pada perolehan penghematan pajak perusahaan sekaligus dapat mempertahankan jumlah saham yang beredar. Hal ini juga akan mendongkrak pendapatan per lembar saham akan lebih tinggi. Namun yang perlu diketahui adalah apabila perusahaan mengalami kegagalan dalam memanfaatkan hutang untuk pengelolaan investasi, maka akan berakibat pada ketidakmampuan perusahaan dalam membayar bunga dan pokok pinjaman. Hal ini juga memposisikan perusahaan pada ambang kebangkrutan.

2.1.4. Nilai Perusahaan

2.1.4.1 Pengertian Nilai Perusahaan

Menurut Harmono (2015:235) nilai perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan dari harga saham yang terbentuk oleh permintaan dan penawaran di pasar modal yang merefleksikan penilaian dari masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Harga saham yang tinggi berbanding lurus dengan tingginya nilai perusahaan dan dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kinerja perusahaan saat ini serta prospek perusahaan di masa mendatang.

2.1.4.2 Alat Ukur Nilai Perusahaan

Indikator yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan adalah Tobins Q yang telah dikembangkan oleh (Chung & Pruitt, 1994). Formulasi ini menghasilkan 99,6% dari formulasi aslinya.

$$Tobin's\ Q = \frac{MVE + D}{BVE + D}$$

Keterangan:

MVE : Nilai Pasar Ekuitas (*Market Value of Equity*), merupakan perkalian antara nilai pasar saham diakhir periode dengan jumlah saham yang beredar diakhir periode.

BVE : Nilai Buku Ekuitas (*Book Value of Equity*), merupakan selisih antara total aset perusahaan dengan total kewajiban.

D : Nilai buku dari total utang perusahaan di akhir periode

2.1.5. Pajak

2.1.5.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut S.I Djajadiningrat (Resmi, 2017:1) pajak diartikan sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Mardiasmo (2016: 3) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara dalam bentuk kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Iuran tersebut akan digunakan negara untuk pembayaran kepentingan umum. Pernyataan ini memberikan pengertian bahwa masyarakat mendapat tuntutan untuk membayar pajak secara penuh sadar dan sukarela sebagai warga negara yang baik.

Berdasarkan pengertian pajak di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak terhadap pemerintah

yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai kepentingan negara dengan memperoleh timbal balik secara tidak langsung.

2.1.5.2. Ciri-Ciri Pajak

Menurut Resmi (2017:2) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang - undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- 3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran- pengeluaran pemerintah.

2.1.5.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:11) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

- 1) *Official asesment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan.
- 2) *Self assesment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).
- 3) *With holding system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.6. Penghindaran Pajak

2.1.6.1. *Pengertian Penghindaran Pajak*

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku (Darmawan dan Sukartha, 2014:145).

Menurut Saputra (2018) penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan dengan memenuhi semua ketentuan perpajakan yang berlaku dan menggunakan strategi di bidang perpajakan, penghindaran pajak ini dilakukan atas dasar banyaknya wajib pajak yang merasa terbebani karena membayar pajak.

Menurut Sulistiono (2018) penghindaran pajak merupakan strategi pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak tanpa bertentangan dengan peraturan undang - undang perpajakan.

Berdasarkan pengertian penghindaran pajak di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak secara legal dilakukan dengan pemanfaatan celah peraturan undang - undang perpajakan yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan beban pajak yang dibayarkan ke negara.

2.1.6.2. *Bentuk Pelanggaran dan Perlawanan Pajak*

Self assessment system merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan menimbulkan penyelewengan dan pelanggaran. Penyelewengan dan pelanggaran tersebut merupakan suatu bentuk dari penghindaran atau perlawanan pajak. Penghindaran pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua (Mulyani, 2014), yaitu sebagai berikut:

- a) Perlawanan pasif yaitu perlawanan pajak diakibatkan oleh adanya hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak. Perlawanan ini tidak dilakukan secara aktif apalagi agresif oleh para wajib pajak.
- b) Perlawanan aktif yaitu perlawanan yang mencakup ruang lingkup seluruh usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak.

2.1.6.3. Karakter Penghindaran Pajak

Menurut komite urusan fiskal dari *Organization for economic cooperation (OECD) (council of executive secretaries of tax organization) (1991)* dalam (Suandy, 2016:8), terdapat tiga karakter penghindaran pajak antara lain:

- 1) Adanya unsur *artificial arrangement* yang mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya. Padahal yang terjadi tidak benar adanya. Hal ini dilakukan karena ketidak adanya faktor pajak.
- 2) Menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal tidak sesuai dengan isi undang-undang perpajakan.
- 3) Para konsultan menunjukkan cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga rahasia sebaik mungkin.

2.1.6.4. Faktor Wajib Pajak Menghindari Pajak

Beberapa faktor yang menyebabkan wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak antara lain:

- 1) Jumlah pajak yang harus dibayar
Semakin besar jumlah beban pajak yang dibayarkan maka semakin besar juga wajib pajak melakukan penghindaran pajak.
- 2) Kemungkinan untuk terdeteksi
Semakin kecil suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar juga wajib pajak melakukan penghindaran pajak.
- 3) Besarnya sanksi
Semakin ringan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran maka semakin besar kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak.

2.1.6.5. Cara Melakukan Penghindaran Pajak

Dalam penelitian Hoque, et al. (2011), beberapa cara yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga akan mengurangi laba bersih dan hutang pajak perusahaan tersebut.
- 2) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga dapat mengurangi hutang pajak perusahaan.
- 3) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga dapat mengurangi laba bersih.
- 4) Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga akan mengurangi laba kena pajak.
- 5) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga dapat mengurangi laba kena pajak.

2.1.6.6. Alat Ukur Penghindaran Pajak

Menurut penelitian Enggar Adityamurti (2017) penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator *Cash Effective Tax Rate (Cash ETR)*. Indikator tersebut merupakan pengembangan penelitian (Dyreng et al., 2008). *Cash ETR* berbeda dengan GAAP ETR dikarenakan GAAP ETR memasukkan pajak kini dan pajak tangguhkan yang sama sekali tidak merefleksikan penghindaran pajak. *Cash Effective Tax Rate* didapatkan dari perhitungan pembagian beban pajak (pajak yang dibayar) oleh perusahaan dengan jumlah laba sebelum pajak perusahaan. Menurutnya, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak bisa dilihat dengan nilai *Cash ETR* yang kecil. *Cash ETR* merupakan proksi yang paling banyak digunakan di dalam penelitian-penelitian terdahulu dan adanya penghindaran pajak bisa dilihat dari nilai ETR yang kecil (Lanis & Richardson, 2013). Persamaan yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

$$CASH\ ETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid}{Pretax\ Income}$$

Keterangan:

Cash ETR : *Effective Tax Rate* sebagai indikator penghindaran pajak

Cash Tax Paid : Beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan

Pretax Income : Laba perusahaan sebelum pajak

2.1.7. Leverage

2.1.7.1. Pengertian Leverage

Kasmir (2014:127) mengemukakan bahwa *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset milik perusahaan dibiayai oleh hutang. Artinya, seberapa besar bunga hutang yang harus ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan aset milik perusahaan. Perusahaan dimungkinkan menggunakan dana dari hutang untuk memenuhi investasi dan kebutuhan operasional perusahaan. Akibat dari hutang yang dilakukan perusahaan, hutang tersebut akan menimbulkan beban tetap yang disebut dengan bunga. Beban bunga yang menjadi kewajiban perusahaan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan sehingga beban pajaknya dapat ditekan dan laba bersih perusahaan dapat dimaksimalkan.

2.1.7.2. Implikasi Penggunaan Leverage

Menurut Weston dan Brigham (1998) karakteristik perusahaan yang menggunakan pendanaan hutang mempunyai tiga implikasi penting antara lain:

- 1) Meningkatkan pendanaan melalui hutang, para pemilik atau pemegang saham perusahaan dapat mempertahankan kendali mereka atas perusahaan dengan investasi yang terbatas
- 2) Kreditur mensyaratkan adanya dana yang harus disediakan oleh pemilik perusahaan sebagai batas keamanan. Artinya, semakin tinggi proporsi jumlah modal yang diberikan oleh pemegang saham maka semakin kecil akan risiko yang dihadapi oleh kreditur
- 3) Apabila perusahaan mendapatkan laba yang lebih besar daripada bunga yang dibayarkan, maka pengembalian modal pemilik akan lebih besar.

Perusahaan yang memiliki rasio hutang lebih tinggi akan menghadapi risiko kerugian yang lebih besar juga pada kondisi ekonomi yang buruk atau resesi, namun mempunyai tingkat pengembalian yang lebih tinggi pada kondisi

perekonomian yang normal. Sebaliknya, perusahaan yang mempunyai rasio hutang rendah tidak akan menghadapi risiko kerugian yang besar di masa perekonomian buruk atau resesi. Namun, peluang akan meningkatnya tingkat pengembalian atas ekuitas pada kondisi normal juga rendah (Weston dan Brigham, 1998).

2.1.7.3. Tujuan Penggunaan Rasio Leverage

Penggunaan rasio *leverage* yang baik dan maksimal akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan untuk menghadapi hal-hal yang kemungkinan akan terjadi. Namun, seluruh kebijakan yang diambil tergantung pada tujuan perusahaan. Kasmir (2013:153) mengungkapkan beberapa tujuan perusahaan antara lain:

- 1) Menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap aset yang dikelola
- 2) Menilai seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang
- 3) Mengetahui keseimbangan antara nilai aset khususnya ekuitas dan aset tetap
- 4) Mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban perusahaan kepada kreditur
- 5) Menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti bunga dan angsuran.

2.1.7.4. Jenis Rasio Leverage

Terdapat 5 (lima) rasio *leverage* yang bisa digunakan oleh perusahaan (Kasmir, 2014:127), diantaranya:

1) *Debt to Equity Ratio* (DER)

Rasio ini pada umumnya digunakan untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan menunjukkan jaminan yang tersedia oleh kreditur. Rasio ini untuk menilai hutang dengan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan.

2) *Debt to Total Asset Ratio* (DAR)

Rasio ini umumnya disebut dengan *debt ratio*. *Debt ratio* merupakan rasio untuk mengetahui perbandingan hutang perusahaan dengan membandingkan antara total hutang dengan total aset perusahaan.

3) *Time Interest Earned Ratio*

Rasio ini biasa digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar bunga, yaitu seberapa besar laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kendala keuangan perusahaan dikarenakan tidak bisa membayar beban bunga.

4) *Fix Charge Coverage Ratio*

Rasio ini disebut dengan rasio menutup beban tetap yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menutup beban seperti bunga, angsuran pinjaman dan sewa, serta pembayaran saham preferen.

5) *Long-term Debt Equity Ratio (LTDER)*

Rasio ini digunakan dengan cara membandingkan hutang jangka panjang dengan ekuitas perusahaan. Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengukur seberapa besar ekuitas yang dijadikan sebagai jaminan hutang jangka panjang.

2.1.7.5. *Alat Ukur Leverage*

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur *leverage* perusahaan adalah *Debt to Equity Ratio* (Wiagustini, 2010:88).

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Ekuitas}}$$

2.1.8. *Transparansi Perusahaan*

2.1.8.1. *Pengertian Transparansi Perusahaan*

Transparansi perusahaan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 adalah “Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”.

Menurut Setyaningsih (2018) transparansi perusahaan merupakan ketersediaan informasi yang beredar luas dan dapat dipercaya terhadap kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu yang meliputi kebijakan pemerintah, posisi keuangan, kesempatan investasi, nilai, dan risiko perusahaan yang sifatnya umum.

2.1.8.2. Pengungkapan Laporan Perusahaan

Pengungkapan merupakan bagian dari pertanggungjawaban dari pelaporan keuangan sekaligus langkah terakhir dalam proses akuntansi yakni penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, catatan dan laporan lainnya serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan (Purwanti, 2018). Oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan merupakan bentuk pengungkapan perusahaan yang berfungsi sebagai media informasi untuk menggambarkan kinerja perusahaan kepada publik.

Pengungkapan laporan keuangan meliputi pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib diartikan sebagai syarat minimum yang harus dipenuhi perusahaan dan pernyataan ini telah disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan butir-butir informasi yang diungkapkan dengan sukarela oleh perusahaan tanpa adanya aturan yang mengharuskan untuk diungkapkan (Prasiwi, 2015). Informasi sukarela yang diberikan manajemen perusahaan kepada investor diharapkan mampu memberikan sinyal positif (*signaling theory*) bagi investor, semakin banyak pengungkapan informasi maka akan semakin banyak pula informasi yang diperoleh investor sehingga diharapkan mampu meningkatkan persepsi investor akan potensi investasi ke suatu perusahaan.

2.1.8.3. Luas Pengungkapan Sukarela

Luas pengungkapan sukarela menggunakan perhitungan indeks dari penelitian Nuryaman (2009) yang sudah disesuaikan dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-431/BL/2012 Tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Indeks pengungkapan sukarela yang digunakan ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Item-item Pengungkapan Sukarela

A.	Informasi Umum Perusahaan
1	Sejarah singkat perusahaan (a,b,c,d,e)

2	Struktur organisasi perusahaan (a,b,c,d,e)
3	Deskripsi tentang produk atau jasa utama yang dihasilkan perusahaan (d)
B Profil Perusahaan	
1	Visi dan misi perusahaan: (i) penjelasan Visi, (ii) penjelasan misi (a,b,c,d)
2	Statement/uraian tujuan dan atau strategi perusahaan secara umum (a,b,c,d,e)
3	Statement/uraian tujuan dan atau strategi perusahaan aspek pemasaran (b,d)
4	Statement/uraian tujuan dan atau strategi perusahaan aspek finansial (b,d)
5	Statement/tujuan dan atau strategi perusahaan aspek sosial (b,d)
6	Uraian dampak strategi terhadap hasil-hasil pada masa sekarang dan/atau masa yang akan datang (b,d)
7	Komposisi kepemilikan saham; (i) nama pemegang saham dan (ii) persentase kepemilikan untuk kepemilikan lebih dari 5% dan direktur dan komisaris, (iii) persentase atau jumlah kepemilikan saham masyarakat yang kurang dari 5%, (a,c)
8	Kronologis pencatatan saham dan atau efek lainnya; (i) kronologis, (ii) jenis tindakan korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah, (iii) perubahan jumlah dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku, (iv) nama bursa dimana saham/efek dicatatkan, (v) khusus untuk efek, informasi peringkat efek, (a)
C Ikhtisar Keuangan	
1	Informasi mengenai nilai tambah dapat secara kualitatif atau kuantitatif (b,d)
2	Pernyataan mengenai kebijakan dividen selama dua tahun buku terakhir; (i) jumlah dividen untuk masing-masing tahun, (ii) besarnya dividen kas per saham, (a,b,d)
3	Penjelasan dampak inflasi terhadap hasil-hasil pada masa sekarang dan atau masa yang akan datang, (b,d)
4	Penjelasan dampak inflasi terhadap nilai aktiva perusahaan pada masa sekarang dan atau masa yang akan datang (b,d)
5	Kebijakan harga transfer (b)
6	Data statistik atau trend, (i) jumlah penjualan, (ii) harga jual per unit (e)
7	Data statistik pertumbuhan penjualan dalam unit(e)
D Informasi Komisaris dan Direksi Perusahaan	
1	Remunerasi; (i) komisaris, (ii) direksi (a,b,c)
2	Uraian mengenai pembagian tanggung jawab fungsional diantara dewan komisaris dan direksi, (b,d)
E Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan	
1	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan (perubahan) kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya atas elemen aktiva meliputi; (i) aktiva lancar, (ii) aktiva tidak lancar, (iii) jumlah aktiva (a,c)
2	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan (perubahan) kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya atas

	elemen kewajiban meliputi: (i) kewajiban lancar, (ii) kewajiban tidak lancar, (iii) jumlah kewajiban, (a,c)
3	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan (perubahan) kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya atas elemen ekuitas (a,c)
4	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan (perubahan) kinerja keuangan tahunan yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya atas elemen penjualan (a,c)
5	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan (perubahan) kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya atas elemen beban usaha; (i) harga pokok penjualan, (ii) biaya administrasi, (iii) pemasaran, (a,c)
6	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan (perubahan) kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya atas elemen laba bersih (a,c)
7	Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan serta laba operasi perusahaan minimal dalam dua tahun terakhir, atau sejak perusahaan didirikan (a)
8	Deskripsi kinerja produksi/operasi, yaitu uraian mengenai pesanan dari pembeli yang belum dipenuhi dan atau kontrak penjualan yang akan direalisasikan di masa yang akan datang (b, d)
9	Deskripsi kinerja pemasaran secara kualitatif atau kuantitatif; (i) analisis pangsa pasar, (ii) analisis pesaing (b,c,d)
10	Deskripsi distribusi, yaitu uraian mengenai jaringan pemasaran barang dan jasa perusahaan (b,c,d)
11	Informasi mengenai biaya yang dipisahkan ke dalam komponen tetap dan variabel (d)
12	Uraian perbandingan antara hasil-hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan.
F	Informasi Tentang Proyeksi dan Prospek Bisnis
1	Peramalan (proyeksi) penjualan atau market share dapat secara kualitatif atau kuantitatif
2	Peramalan (proyeksi) laba dapat secara kualitatif atau kuantitatif
3	Peramalan <i>cash flow</i> dapat secara kualitatif atau kuantitatif
4	Deskripsi asumsi yang mendasari proyeksi yang dibuat perusahaan
5	Deskripsi kegiatan riset dan pengembangan dapat meliputi yang telah dilaksanakan dan atau yang akan dilaksanakan meliputi: (i) kebijakan, (ii) lokasi aktivitas, (iii) jumlah personal yang dilibatkan, (iv) hasil yang dicapai/diharapkan (c,d)
6	Uraian mengenai kegiatan investasi atau pengeluaran modal yang telah dan atau yang akan dilaksanakan (a,b,c,d)
7	Deskripsi tentang prospek bisnis perusahaan kedepan dalam kaitannya dengan kondisi ekonomi, industri, pasar (lokal, regional, internasional) dapat secara kualitatif atau kuantitatif (a, b)

G	Informasi Karyawan
1	Jumlah karyawan (a,b,c,d,e)
2	Rincian pegawai menurut bidang pekerjaan /kompetensi (a,b,c,d)
3	Pelatihan (<i>training</i>) pegawai (b,c,d)
4	Kompensasi dan upah minimum pegawai (b,c,d,e)
5	Jaminan sosial tenaga kerja (b,c,d)
6	Dana pensiun karyawan (b,c)
7	<i>Statement</i> kebijakan perusahaan mengenai kesempatan yang sama terhadap karyawan tanpa memandang suku, agama, dan ras (b,d)
8	Uraian kondisi mengenai kesehatan dan keselamatan dalam lingkungan kerja (b,d)
9	Perubahan jumlah pegawai, penjelasan mengenai perubahan jumlah pegawai (b)
10	Penghargaan (<i>reward</i>) prestasi kerja (d)
H	Kebijakan dan Tanggung Jawab Sosial
1	Jaminan kualitas produk (b,c,d)
2	Komplain pelanggan (c)
3	Sertifikasi produk tingkat nasional, internasional (a,c)
4	Deskripsi pengendalian polusi dan kerusakan lingkungan dapat secara kualitatif atau kuantitatif (b,c)
5	Menyediakan/membangun fasilitas sosial di lingkungan perusahaan (b,c)
6	Mendukung program pemerintah di bidang sosial/kesehatan masyarakat/kegiatan olah raga (b,c)
7	Beasiswa sekolah/kuliah/riset (c)
I	Informasi Tata Kelola Perusahaan
1	Uraian pelaksanaan tugas komisaris meliputi; (i) frekuensi pertemuan komisaris, (ii) tingkat kehadiran dewan komisaris dalam pertemuan. (a)
2	Deskripsi pelaksanaan tugas dewan komisaris (a)
3	Jumlah komisaris independen (a,c)
4	Latar belakang komisaris independen; (i) pendidikan, (ii) pengalaman (a,c)
5	Jumlah komite audit (a,c)
6	Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit (a,c)
7	Deskripsi pelaksanaan tugas komite: (i) audit, (ii) nominasi, (iii) remunerasi, (iv) komite lainnya (jika ada)
8	Deskripsi tentang tugas dan fungsi sekretaris perusahaan; (i) nama, (ii) riwayat jabatan singkat atau latar belakang, (iii) uraian pelaksanaan tugas (a)
9	Deskripsi tentang pelaksanaan satuan pengawasan intern (SPI) tentang: (i) informasi tentang keberadaannya dalam organisasi, (ii) penjelasan tentang aktivitasnya (a)
10	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik misalnya melalui website, media masa, mailing list, buletin, dan lain- lain (a)
11	Deskripsi tentang etika perusahaan. Memuat antara lain: (i) keberadaan aturan etika di perusahaan, (ii) deskripsi aturan etika secara umum, (iii)

	pelaksanaan dan penegakannya, (iv) pernyataan mengenai budaya perusahaan, (a)
12	Deskripsi tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada operasi perusahaan, (a,c)
	(a) Bapepam dan LK; (b) Chau and Gray; (c) Utami; (d) Suripto; (e) Botosan

Sumber: (Nuryaman, 2009)

2.1.8.4. Alat Ukur Transparansi Perusahaan

Transparansi perusahaan diproksikan menggunakan luas pengungkapan sukarela. Proksi tersebut diperoleh dari seberapa banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan, serta disesuaikan menggunakan indeks yang disusun dan dibagi menggunakan total seluruh item pengungkapan sukarela (Pradnyana dan Noviani, 2017). Metode pengukurannya dengan cara memberi skor 1 dan 0, yang mana skor 1 diberikan jika suatu item diungkapkan dan skor 0 diberikan jika item tidak diungkapkan. Rumus dari pengukuran tersebut adalah:

$$TP = \frac{n}{k}$$

Keterangan:

TP : Transparansi Perusahaan

n : Jumlah item pengungkapan sukarela yang ada dalam laporan

k : Jumlah keseluruhan item pengungkapan sukarela

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan referensi dari hasil penelitian terdahulu sebagai gambaran dalam melakukan penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat:

- 1) Tarida dan Prasetyo (2018) dengan judul penelitian Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dan Biaya Agensi dengan Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. Metode analisis menggunakan analisis regresi liner berganda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah variabel independen penghindaran pajak, variabel dependen nilai perusahaan, dan variabel

moderasi transparansi perusahaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tambahan variabel independen biaya agensi yang tidak akan digunakan penulis dan analisis selisih nilai mutlak yang penulis gunakan.

- 2) Hanif dan Ardiyanto (2019) dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Praktik Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Metode analisis menggunakan analisis regresi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah variabel independen penghindaran pajak, variabel dependen nilai perusahaan, dan variabel moderasi transparansi perusahaan serta teknik analisis yang digunakan yaitu *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini menggunakan variabel kontrol *SIZE*, *ROA*, *DEBT*, dan *PPE* serta penulis menggunakan tambahan variabel independen *leverage*.
- 3) Ilmiani, A., & Sutrisno, C. R. (2015) dengan judul penelitian Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2012. Metode analisis menggunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah variabel independen penghindaran pajak, dependen nilai perusahaan, dan moderasi transparansi perusahaan. Perbedaannya adalah tambahan variabel independen *leverage*.
- 4) Anggoro & Septiani (2015) dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating. Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2013. Metode analisis menggunakan regresi linier berganda dan analisis selisih nilai mutlak untuk regresi moderasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah variabel independen penghindaran pajak, variabel dependen nilai perusahaan, dan variabel moderasi transparansi perusahaan,

serta metode analisis yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah populasi penelitian dan tambahan variabel independen *leverage*.

- 5) Tarihoran (2016) dengan judul penelitian Pengaruh Penghindaran Pajak dan *Leverage* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. Metode analisis menggunakan regresi linier berganda dan uji residual dengan persamaan regresi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah variabel independen penghindaran pajak dan *leverage*, variabel dependen nilai perusahaan, dan variabel moderasi transparansi perusahaan dan metode analisis regresi linier berganda. Perbedaan penelitian dengan penulis adalah teknik analisis selisih nilai mutlak.
- 6) Kurniawan dan Syafruddin (2017) judul penelitian Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Variabel Moderasi Transparansi. Populasi penelitian adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016. Teknik analisis menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah variabel independen penghindaran pajak, variabel dependen nilai perusahaan, dan variabel moderasi transparansi informasi serta metode analisis yang digunakan. Sedangkan perbedaan terletak pada teknik analisis regresi berganda.
- 7) Partha dan Noviari (2016) judul penelitian Pengaruh Penghindaran Pajak Jangka Panjang Pada Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi. Populasi penelitian adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004-2014 dan diperoleh sampel 70 perusahaan amatan. Teknik analisis menggunakan regresi sederhana dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah variabel independen penghindaran pajak, variabel dependen nilai perusahaan, dan variabel moderasi transparansi informasi serta teknik analisis yang

digunakan. Sedangkan perbedaan terletak pada teknik analisis regresi berganda.

- 8) Suwardika dan Mustanda (2017) judul penelitian Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Properti. Penelitian ini mengambil sampel 41 perusahaan selama periode penelitian yaitu tahun 2013-2015. Teknik analisis menggunakan regresi liner berganda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah variabel independen *leverage*, variabel dependen nilai perusahaan, dan analisis regresi liner berganda. Sedangkan perbedaannya peneliti tidak menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas.
- 9) Novari dan Lestari (2016) judul penelitian Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Properti Dan *Real Estate*. Populasi penelitian ini adalah 49 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014 dan diperoleh sampel 40 perusahaan. Teknik analisis menggunakan regresi liner berganda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah variabel independen *leverage*, variabel dependen nilai perusahaan, dan analisis regresi liner berganda. Sedangkan perbedaannya peneliti tidak menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, dan profitabilitas.
- 10) Suropto dan Sugiyanto (2020) judul penelitian Transparansi Perusahaan Memoderasi Pengaruh *Tax Avoidance* dan *Leverage* Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini adalah 173 perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 dan diperoleh sampel 22 perusahaan sehingga terdapat 110 sampel penelitian. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah variabel independen penghindaran pajak dan *leverage*, variabel dependen nilai perusahaan, dan variabel moderasi transparansi perusahaan.

11) Septyaningrum (2020) judul penelitian Pengaruh Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. Populasi penelitian ini adalah 152 perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 dan diperoleh 80 sampel penelitian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah variabel independen penghindaran pajak dan *leverage*, variabel dependen nilai perusahaan, dan variabel moderasi transparansi informasi. Metode analisis tidak disebutkan. Sedangkan perbedaannya terletak pada tambahan variabel independen ukuran perusahaan yang tidak akan digunakan penulis dan analisis regresi berganda serta selisih nilai mutlak yang penulis gunakan.

Tabel 2.2
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tarida dan Prasetyo (2018)	Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dan Biaya Agensi Dengan Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi. Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016	Variabel independen: Penghindaran pajak Variabel dependen: Nilai perusahaan dan biaya agensi Variabel moderasi: Transparansi informasi	Analisis regresi linier berganda	1) Penghindaran pajak berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 2) Penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya agensi. 3) Tranparansi informasi berhasil memoderasi pengaruh pengindaran pajak terhadap nilai perusahaan menjadi positif.
2	Hanif dan	Analisis Pengaruh Praktik	Variabel independen:	Analisis regresi	1) Terdapat pengaruh negatif

	Ardiyanto (2019)	Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi. Studi pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017	Penghindaran pajak Variabel dependen: Nilai perusahaan Variabel moderasi: Transparansi informasi		pada hubungan antara <i>tax avoidance</i> dan nilai perusahaan 2) Transparansi informasi dapat mengurangi pengaruh <i>tax avoidance</i> terhadap nilai perusahaan
3	Ilmiani, A., & Sutrisno, C. R. (2015)	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012	Variabel independen: <i>Tax avoidance</i> Variabel dependen: Nilai perusahaan Variabel moderasi: Transparansi perusahaan	Analisis regresi moderasi	1) <i>Tax avoidance</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan 2) Variabel transparansi perusahaan mampu memoderasi pengaruh <i>tax avoidance</i> terhadap nilai perusahaan dengan arah positif
4	Kurniawan dan	Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan	Variabel independen: Penghindaran pajak	Analisis regresi berganda	1) Perilaku penghindaran pajak berpengaruh signifikan

	Syafruddin (2017)	Dengan Variabel Moderasi Transparansi. Studi pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016	Variabel dependen: Nilai perusahaan Variabel moderasi: Transparansi		terhadap nilai perusahaan, namun dengan arah yang positif 2) Perilaku penghindaran pajak memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap biaya agensi 3) Transparansi dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan
5	Anggoro & Septiani (2015)	Analisis Pengaruh Perilaku Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating. Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2013	Variabel independen: Perilaku Penghindaran pajak Variabel dependen: Nilai perusahaan Variabel moderasi:	Analisis regresi linier berganda dan analisis selisih nilai mutlak	1) Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan biaya agensi 2) Transparansi perusahaan dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan

			Transparansi Perusahaan		
6	Tarihoran (2016)	Pengaruh Penghindaran Pajak dan <i>Leverage</i> Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014	Variabel independen: Penghindaran pajak dan <i>leverage</i> Variabel dependen: Nilai perusahaan Variabel moderasi: Transparansi perusahaan	Analisis regresi linier berganda	1) Secara simultan, Penghindaran Pajak dan <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 2) Secara parsial, <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Sedangkan penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 3) Transparansi Perusahaan mampu memoderasi hubungan antara Penghindaran Pajak dan <i>Leverage</i> terhadap Nilai Perusahaan.
7	Partha dan Noviari,	Pengaruh Penghindaran Pajak Jangka Panjang Pada Nilai	Variabel independen: Penghindaran pajak	Analisis regresi sederhana dan	1) Penghindaran pajak jangka panjang tidak berpengaruh

	(2016)	Perusahaan Dengan Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi. Studi pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004-2014	jangka panjang Variabel dependen: Nilai perusahaan Variabel moderasi: Transparansi informasi	<i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i> Menggunakan program SPSS	signifikan terhadap nilai perusahaan 2) Transparansi informasi mampu memoderasi pengaruh penghindaran pajak jangka panjang pada nilai perusahaan
8	Suwardika dan Mustanda (2017)	Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. Studi pada perusahaan properti yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015	Variabel independen: <i>Leverage</i> , ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas Variabel dependen: Nilai perusahaan	Analisis regresi linier berganda	1) <i>Leverage</i> , pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, dimana variabel yang memiliki hubungan positif yaitu leverage dan profitabilitas. Sedangkan pertumbuhan perusahaan berhubungan negatif. 2) Ukuran perusahaan terhadap

					nilai perusahaan tidak berpengaruh signifikan
9	Novari dan Lestari (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Properti Dan <i>Real Estate</i> . Studi pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014	Variabel independen: Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan profitabilitas Variabel dependen: Nilai perusahaan	Analisis regresi linier berganda	1) Ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 2) <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan
10	Suripto dan Sugiyanto (2021)	Transparansi Perusahaan Memoderasi Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> dan <i>Leverage</i> Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. Studi pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018	Variabel independen: <i>Tax avoidance</i> dan <i>leverage</i> Variabel dependen: Nilai perusahaan	Uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	1) <i>Tax avoidance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 2) <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 3) Transparansi perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan 4) Secara simultan, penghindaran

					<p>pajak dan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan</p> <p>5) Transparansi perusahaan tidak mampu memoderasi penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan</p> <p>6) Transparansi perusahaan mampu memoderasi dan memperkuat hubungan <i>leverage</i> terhadap nilai perusahaan</p>
11	Septyaningrum (2020)	Pengaruh Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i> Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. Studi pada perusahaan	<p>Variabel independen: Penghindaran pajak, ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i></p> <p>Variabel dependen: Nilai perusahaan</p>	Tidak disebutkan oleh peneliti	<p>1) Penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan</p> <p>2) Ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan</p>

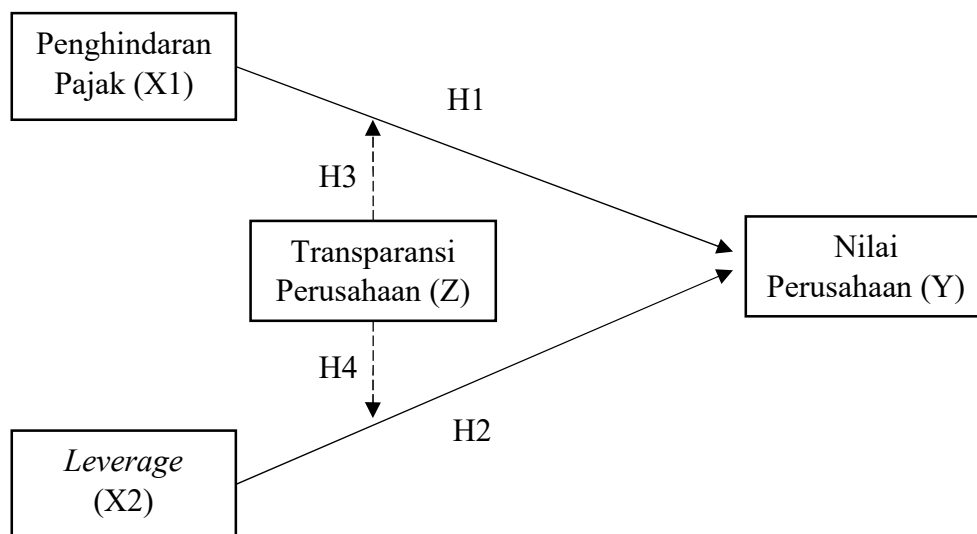
		manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.	Variabel moderasi: Transparansi perusahaan		<p>3) Transparansi informasi tidak memperkuat penghindaran pajak dan <i>leverage</i> terhadap nilai perusahaan</p> <p>4) Transparansi informasi memperkuat ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan</p>
--	--	---	---	--	--

2.3. Model Konseptual Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel, yaitu penghindaran pajak dan *leverage* sebagai variabel independen, nilai perusahaan sebagai variabel dependen, dan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi. Model konseptual penelitian ini ditunjukkan dalam gambar berikut:

Gambar 2.1

Model Konseptual Penelitian



2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan

Dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan, manajemen perusahaan dapat menggunakan strategi perencanaan pajak berupa penghindaran pajak (Inanda et al., 2018). Upaya pengoptimalan nilai perusahaan yang menjadi tujuan perusahaan dapat direalisasikan melalui pelaksanaan manajemen perusahaan. Suatu kebijakan keuangan yang diambil oleh manajemen perusahaan akan berpengaruh terhadap kebijakan keuangan lainnya dan akan berdampak pada nilai perusahaan, yang mana kebijakan manajemen perusahaan salah satunya adalah tindakan penghindaran pajak (Fama & French, 1998). Penghindaran pajak merupakan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam rangka mengurangi beban pajak terutang dimana kegiatan ini masih dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku (Tarida & Prasetyo, 2018).

Pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan mempunyai dua perspektif yang berbeda, yaitu positif dan negatif (Inanda et al., 2018). Beban pajak yang dikeluarkan perusahaan akan berkurang apabila perusahaan berhasil mengurangi pengeluaran pajak yang terutang. Beban pajak yang berkurang akan menyebabkan pendapatan setelah pajak perusahaan meningkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin kecil beban pajak perusahaan yang terutang, maka pendapatan setelah pajak perusahaan akan semakin besar. Laba perusahaan yang besar mengindikasikan bahwa perusahaan telah mampu menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik dan maksimal. Para investor atau calon investor akan berpandangan bahwa dengan laba perusahaan yang besar maka perusahaan juga mempunyai kemampuan untuk memberikan pengembalian investasi yang besar pula kepada investor. Minat investor yang tinggi terhadap perusahaan tersebut menyebabkan kenaikan harga saham di pasar dikarenakan jumlah saham yang beredar menjadi terbatas.

Namun, jika perilaku penghindaran pajak dihubungkan dengan *agency theory* dapat memberikan kesempatan manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan oportunistik berupa manipulasi laba dan memanfaatkan kegiatan ini untuk mendapatkan keuntungan mereka sendiri. Tindakan penghindaran pajak juga dapat menyebabkan asimetri informasi yang memunculkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dan tidak diketahui oleh pemegang saham. Kelebihan kas yang diperoleh dari tindakan penghindaran pajak menjadi kesempatan bagi manajemen perusahaan untuk melakukan pengeluaran yang lebih besar lagi menggunakan kas perusahaan dan mengambil keuntungan pribadi yang dapat mengurangi arus kas di masa mendatang sehingga menyebabkan nilai perusahaan menurun (Chen et al., 2014). Menempatkan sumber daya yang tidak sesuai dan kurang transparan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan juga dapat menyebabkan dampak negatif terhadap nilai perusahaan.

Sebanyak 5 (lima) jurnal penelitian sebelumnya yang penulis gunakan menunjukkan hasil penelitian bahwa penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan arah positif sebanyak 2 (dua) jurnal dan arah negatif

sebanyak 3 jurnal. Penelitian sebelumnya oleh Ilmiani & Sutrisno (2014) menunjukkan bahwa aktivitas penghindaran pajak dapat mengurangi nilai perusahaan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Tarida & Prasetyo (2018) dan Hanif & Ardiyanto (2019) yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak secara konsisten menurunkan nilai perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mengajukan hipotesis:

H1: Penghindaran Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap Nilai Perusahaan

2.4.2. Pengaruh *Leverage* Terhadap Nilai Perusahaan

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. Sumber-sumber dana yang dapat diperoleh perusahaan bersumber dari internal berupa modal sendiri dan dari eksternal berupa pinjaman atau hutang. Penggunaan hutang oleh perusahaan dimungkinkan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan ekspansi perusahaan. Apabila ekspansi perusahaan berhasil, maka hutang dapat dibayar oleh perusahaan dan investor akan mendapatkan pengembalian sebagai akibat dari meningkatnya profitabilitas.

Di sisi lain, penggunaan hutang dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajiban perusahaan di masa mendatang sehingga hal ini mendapat respon yang positif dari pasar. Penggunaan hutang dapat memotong biaya penghasilan pajak dikarenakan biaya yang dikeluarkan akan digunakan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman. Adanya pengurangan beban pajak dapat meningkatkan laba perusahaan sehingga hasilnya dapat dialokasikan untuk pembagian dividen atau reinvestasi. Adanya reinvestasi dapat memberikan respon positif dari pasar sehingga dapat meningkatkan penilaian pasar terhadap perusahaan yang akan berdampak pada peningkatan harga saham di pasar modal. Hal ini juga sekaligus dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Hasil penelitian Tarihoran (2016) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Suwardika & Mustanda (2017) dan Septyaningrum (2020) bahwa *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap

nilai perusahaan yang menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai *leverage* maka nilai perusahaan juga akan meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mengajukan hipotesis:

H2: *Leverage* Berpengaruh Positif Terhadap Nilai Perusahaan

2.4.3. Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dimoderasi oleh Transparansi Perusahaan

Dari sudut pandang agensi mengenai penghindaran pajak, tata kelola perusahaan merupakan faktor penting yang menentukan penilaian dari pengakuan penghindaran pajak perusahaan. Pengaruh langsung dari adanya praktik penghindaran pajak adalah meningkatnya laba setelah pajak perusahaan, utamanya pada perusahaan dengan tata kelola yang kurang baik yang akan mendorong kesempatan manajemen perusahaan untuk mengalihkan biaya. Artinya, pengaruhnya terhadap nilai perusahaan harus lebih besar untuk perusahaan dengan transparansi perusahaan yang lebih baik. Oleh karena itu, analisis tersebut menggambarkan bahwa transparansi perusahaan berinteraksi dengan penghindaran pajak.

Dalam menghadapi konflik *agency problem* yang parah, transparansi perusahaan dapat membantu untuk mengurangi konflik tersebut. Selain itu dalam *signalling theory* ditekankan pentingnya informasi yang dikeluarkan perusahaan karena mengandung sinyal-sinyal bagi para pemegang saham dan *stakeholders*. Informasi yang relevan, akurat, transparan, dan tepat waktu sangat dibutuhkan oleh investor untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Perusahaan dituntut untuk dapat memberikan informasi yang lengkap dikarenakan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham yang mana manajemen menguasai lebih banyak informasi tersebut dibandingkan dengan pihak luar perusahaan termasuk investor. Adanya transparansi perusahaan dapat mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan nilai perusahaan. Aktivitas penghindaran pajak diharapkan manajemen dapat memberikan sinyal positif bagi para investor. Hal tersebut diyakini karena praktik penghindaran pajak dapat meningkatkan nilai perusahaan karena terlihat dalam laporan tahunan dan keuangan perusahaan.

Hasil penelitian Kurniawan dan Syafruddin (2017), transparansi mampu memoderasi hubungan antara penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dan mampu mengurangi konflik antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham, sehingga manajer mampu mengelola hasil dari penghindaran pajak untuk meningkatkan nilai perusahaan secara maksimal. Sejalan dengan hasil penelitian Hanif & Ardiyanto (2019), Tarida & Prasetyo (2018), (Ilmiani & Sutrisno, 2014), dan (Anggoro & Septiani, 2015) bahwa transparansi perusahaan mampu memoderasi hubungan antara penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. Menurut Chen et al. (2014) penghindaran pajak dapat mengurangi nilai perusahaan akan tetapi pengaruhnya dapat diperkecil pada perusahaan yang memiliki transparansi yang baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mengajukan hipotesis:

H3: Transparansi Perusahaan Mampu Memoderasi Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan

2.4.4. Pengaruh *Leverage* Terhadap Nilai Perusahaan dimoderasi oleh Transparansi Perusahaan

Tinggi rendahnya perusahaan dalam menggunakan pendanaan dari hutang mencerminkan bahwa risiko perusahaan relatif tinggi. Akibatnya adalah investor cenderung menghindari perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi karena bisa menurunkan nilai perusahaan. Transparansi informasi pada laporan keuangan perusahaan diharapkan dapat membantu investor dalam memahami informasi dan membantu dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan investasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hasil penelitian dari Tarihoran (2016) menyatakan transparansi perusahaan dapat memoderasi hubungan antara *leverage* terhadap nilai perusahaan. Sejalan dengan penelitian Suropto dan Sugiyanto (2021) bahwa transparansi perusahaan mampu memoderasi hubungan *leverage* terhadap nilai perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan menyajikan informasi yang cukup, akurat, dan memadai. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mengajukan hipotesis:

H4: Transparansi Perusahaan Mampu Memoderasi Pengaruh Penghindaran *Leverage* Terhadap Nilai Perusahaan